

ABSTRAK

Kebijakan kampung tematik adalah merupakan solusi terhadap permasalahan lingkungan dan ketertinggalan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pun menjadi tujuan yang tidak kalah penting untuk implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan kampung tematik yang dirumuskan pemerintah di tinjau dari empat aspek implemantasi kebijakan yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi di Kota Tangerang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (Case Study), desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan kondisi nyata di lapangan diangkat berdasarkan hasil studi kasus-kualitatif dan teknik penyajiannya digunakan studi deskriptif-analitik. Instrumen penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan angket.

Hasil penelitian dan temuan adalah sebagai berikut Implementasi kebijakan program Kampung Tematik sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang, dimana para penggerak kampung dan pemeritntah setempat melaksanakan program Kampung Tematik dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, untuk dinas terkait, melaksanakan sosialisasi, mengadakan pelatihan, serta melaksanakan monev, sekalipun kegiatan monev tidak dalaksanakan secara kontinue.

Manfaat sekolah gratis bagi masyarakat adalah: 1) Memberikan motivasi bagi masyarakat untuk membangun kampung, 2) Menumbuhkan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), 3) Membangun mental masyarakat untuk bisa mandiri dengan sumber daya local yang dimiliki.

Faktor pendorong adalah: 1) Kebijakan pemerintah tentang program Kampung Tematik untuk semua wilayah di Kota Tangerang, 2) Masyarakat merespon kebijakan tersebut dengan ikut serta membangun dan membuat program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tema tertentu yang disesuaikan dengan potensi lokal.

Faktor penghambat adalah: 1) Pendanaan untuk pengembangan program Kampung Tematik bagi setiap wilayah, 2) Akses terhadap jaringan untuk pemnafaatan hasil kreativitas yang diidapat dari masyarakat Kampung Tematik

Kata Kunci: Kebijakan, Kampung Tematik

ABSTRACT

The thematic village policy is a solution to environmental problems and being left behind in today's society. Clean and Healthy Living Behavior (PHBS) is also an equally important goal for implementing community empowerment policies.

This study aims to determine the problems related to the implementation of thematic village policies formulated by the government in terms of four aspects of policy implementation, namely communication factors, resources, disposition and bureaucratic structure in Tangerang City.

This research uses a case study approach, the research design used is qualitative research, while the real conditions in the field are based on the results of a qualitative case study and the presentation technique is a descriptive-analytic study. The research instrument uses observation, interview and questionnaire techniques.

The results and findings are as follows: Implementation of the Thematic Village program policy in accordance with the policies made by the Tangerang City Government, where the village movers and the local government carry out the Thematic Village program starting from outreach to the community. Meanwhile, for the relevant agencies, carry out socialization, conduct training, and carry out monev, even though monev activities are not carried out continuously.

The benefits of free schools for the community are: 1) Motivating the community to build a village, 2) Fostering a culture of Clean and Healthy Living Behavior (PHBS), 3) Building people's mentality to be independent with their local resources.

The driving factors are: 1) Government policy regarding the Thematic Village program for all areas in Tangerang City, 2) The community responds to the policy by participating in building and making community empowerment programs according to certain themes that are adapted to local potential.

The inhibiting factors are: 1) Funding for the development of the Thematic Village program for each region, 2) Access to networks for utilizing the creativity results obtained from the Thematic Village community

Keywords: Policy, Thematic Village